

**RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI
RSUD AJIBARANG
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
Jl. Pancasan – Ajibarang Kode Pos 53163 Telp. (0281) 6570004 Fax
(0281)6570005 E- mail : rsudajibarang@banyumaskab. go. id

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki tahun ke-9 (sembilan), namun pelaksanaan Reformasi di RSUD Ajibarang baru memasuki tahun ke-2 (kedua) karena pembentukan Tim Reformasi Birokrasi baru dilaksanakan pada tahun 2017, sehingga masih banyak yang perlu di laksanakan.

Rencana Kerja Reformasi Birokrasi RSUD Ajibarang tahun 2019 merupakan dokumen yang digunakan sebagai alat bantu dalam pengukuran pencapaian kinerja serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di RSUD Ajibarang dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

Rencana Kerja ini memuat program dan kegiatan yang selaras dengan sasaran strategis RSUD Ajibarang dalam mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh RSUD Ajibarang.

Melalui kesempatan ini saya mengharapkan dan mengajak kepada seluruh pegawai di RSUD Ajibarang untuk terus berupaya meningkatkan kemampuan dan kinerja individu yang akan bermuara pada kinerja organisasi. Kepada Tim Reformasi Birokrasi RSUD Ajibarang hendaknya mampu menjadi lokomotif dengan membuat terobosan yang inovatif dalam mengembangkan reformasi di lingkungan RSUD Ajibarang dengan mengacu pada Rencana Kerja Reformasi Birokrasi yang telah dibuat.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi RSUD Ajibarang 2017-2022 , semoga mampu mewujudkan sasaran guna mencapai “Birokrasi yang berkinerja tinggi”.

Semoga upaya kita mendapat Ridho Allah SWT dan diberikan kemudahan dalam menjalankannya.

Ajibarang, Desember 2019



dr. DANI ESTI NOVIA

Pembina Tk. I

NIP. 19801113 200212 2 006

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi RSUD Ajibarang merupakan titik awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di RSUD Ajibarang, dimana langkah-langkah pelaksanaan Reformasi dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan/memperkuat.

Reformasi birokrasi dilakukan melalui upaya memelihara dan atau meningkatkan/memperkuat area perubahan yang sudah mencapai kemajuan, sehingga terjadi perbaikan berkelanjutan.

2. Melanjutkan upaya-upaya perubahan.

Reformasi birokrasi dilakukan melalui upaya untuk melanjutkan langkah-langkah perubahan positif yang sedang berlangsung terhadap seluruh aspek dalam area perubahan. Langkah-langkah perubahan dilakukan dengan melihat berbagai pengalaman masa lalu, keterkaitannya dengan langkah-langkah perubahan lainnya, serta hasil pembelajaran dari instansi lain, sebagai upaya untuk mempercepat keberhasilan.

3. Mengidentifikasi masalah lain dan mencari solusi pemecahannya.

Reformasi birokrasi dilakukan untuk menjawab secara cepat berbagai permasalahan baru yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Memperluas cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi dilakukan dengan memperluas cakupan dari berbagai aspek yang belum tersentuh dan muncul sesuai dengan perkembangan terkini. Dalam lima tahun ke depan diharapkan melalui reformasi birokrasi pemerintah sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah sampai pada tatanan pemerintahan yang dinamis.

B. Tujuan Reformasi Birokrasi

Tujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada RSUD Ajibarang yang berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis.
2. Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan *outcomes* (hasil).
3. Sudah menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja.
4. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

C. Sasaran Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran reformasi birokrasi berikut.

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Birokrasi yang efektif dan efisien.
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Pada RSUD Ajibarang, rencana pelaksanaan reformasi birokrasi dijabarkan dalam Rencana Kerja Reformasi Birokrasi yang menjadi panduan bagi pengelola reformasi birokrasi di RSUD Ajibarang dalam melakukan langkah-langkah konkrit memperbaiki kualitas birokrasi RSUD Ajibarang.

Dari uraian yang sudah dimukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja Reformasi Birokrasi RSUD Ajibarang 2019 harus menganut 2 (dua) prinsip dasar yaitu *Prinsip Kestinambungan* dan *Prinsip Keselarasan*. Kedua prinsip ini perlu ditegaskan untuk menjaga sinergisme semua aspek birokrasi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan.

Prinsip Kestinambungan bermakna penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi RSUD Ajibarang tahun 2018 harus merupakan proses kestinambungan, yang secara konsisten melanjutkan capaian pelaksanaan reformasi yang ada sampai saat ini dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut.

- a. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025.

- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Institusi Pemerintah.

Prinsip keselarasan bermakna penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi RSUD Ajibarang 2019 harus selaras dengan:

- a. Amanat Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025.
- b. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019.
- d. Dokumen Perencanaan Strategis RSUD Ajibarang 2014-2018 .

BAB II RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI

A. SASARAN REFORMASI BIROKRASI

Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi RSUD Ajibarang ditinjau dari 8 (delapan) area perubahan yang harus dicapai oleh RSUD Ajibarang dalam Rencana Kerja Reformasi Birokrasi RSUD Ajibarang 2010-2014, sebagaimana tergambar dalam tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Delapan Area Perubahan Capaian Sasaran Reformasi Birokrasi RSUD Ajibarang

No	Sasaran Reformasi Birokrasi (Hasil)	Area Perubahan (Pengungkit)
1.	Birokrasi yang bersih dan bebas KKN	1. Manajemen Perubahan 2. Penguatan Sistem Pengawasan 3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
2.	Birokrasi yang Efektif dan Efisien	4. Penguatan Kelembagaan 5. Penguatan Tata Laksana 6. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN 7. Penguatan Peraturan Perundangan
3.	Kualitas Pelayanan Publik	8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 9. <i>Quick Win</i>

B. ISU STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI

Isu strategis-agenda Reformasi Birokrasi RSUD Ajibarang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hal-hal berikut :

- a. Isu-agenda strategis Reformasi Birokrasi Makro (Nasional), yaitu bahwa reformasi birokrasi tahapan 2015-2019 memasuki tahapan penguatan dengan tujuan tercapainya birokrasi pemerintah yang berbasis kinerja;
- b. Tuntutan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;

- c. Lingkungan strategis (peraturan perundangan, lingkungan internal dan eksternal RSUD Ajibarang), yaitu terkait dengan organisasi Rumah Sakit, SDM Aparatur dan pemberlakuan peraturan di bidang kesehatan dan lainnya.

Memperhatikan kaitan isu strategis-agenda Reformasi Birokrasi RSUD Ajibarang dengan tiga hal tersebut di atas, maka dapat dirumuskan agenda prioritas Reformasi Birokrasi RSUD Ajibarang 2017-2019 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut dibawah ini.

No	Isi Strategis	Agenda Prioritas 2017-2019
a.	Reformasi Birokrasi RSUD Ajibarang	a. Perluasan ruang lingkup implementasi reformasi birokrasi b. Pengintegrasian sistem berbasis TIK dan penguatan lembaga dan SDM pengelolanya dalam rangka mewujudkan Birokrasi yang lebih efektif dan efisien c. Penguatan Manajemen pelaksanaan reformasi Birokrasi RSUD Ajibarang melalui peningkatan anggaran, penguatan fungsi organisasi dan tata kerja Tim Reformasi Birokrasi d. Peningkatan kompetensi dan kinerja Tim RB dan Assesor dan Agent of Change (AoC) e. Peningkatan persepsi positif pemangku kepentingan terhadap reformasi birokrasi RSUD Ajibarang; f. Peningkatan engagement pegawai terhadap Reformasi Birokrasi RSUD Ajibarang g. Pencapaian Quick Wins Reformasi Birokrasi RSUD Ajibarang 2017-2019
b.	Pengawasan	a. Penguatan system pengaduan yang berindikasi kerugian Negara yang terintegrasi;

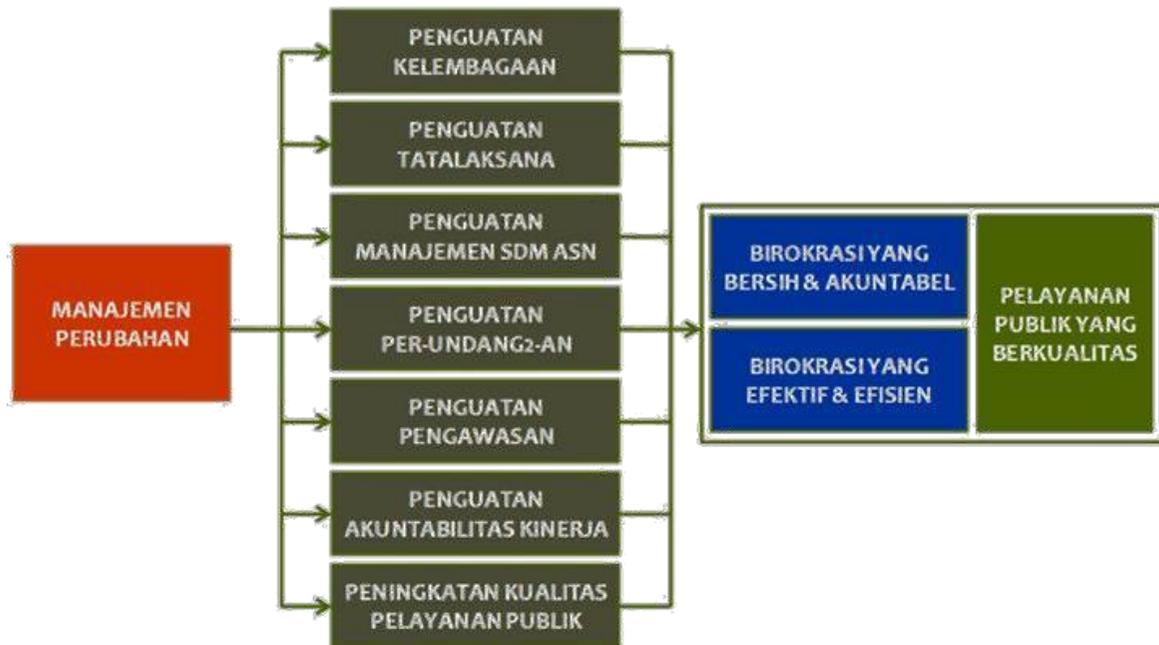
		<ul style="list-style-type: none"> b. Sinergi pengawasan internal dan eksternal c. Penguatan pelaksanaan Whistle Blowing System di semua unit; d. Peningkatan pelaksanaan benturan kepentingan di semua unit; e. Peningkatan pelaksanaan SPI di unit-unit
c.	Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) b. Pembangunan / pengembangan SIM RS c. Pelibatan secara aktif unsur pimpinan dalam penyusunan, penetapan dan pemantauan serta evaluasi pencapaian kinerja secara berkala d. Pelaporan kinerja RSUD Ajibarang secara terbuka
d.	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan reformasi birokrasi dalam organisasi RSUD Ajibarang; b. Penyesuaian organisasi RSUD Ajibarang dengan perkembangan dan tantangan c. Sinergisme RSUD Ajibarang dengan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten
e.	Ketatalaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di RSUD Ajibarang b. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di RSUD Ajibarang c. Penerapan undang-undang, keterbukaan informasi public di RSUD AJibarang d. Penetapan system kearsipan yang handal di RSUD Ajibarang
f.	SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan kinerja individu Pegawai RSUD Ajibarang; b. Pengukuran kesenjangan kompetensi bagi

		<p>seluruh pegawai untuk penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan berbasis kompeten;</p> <p>c. Penerapan</p> <p>d. Penguatan reward and punishment secara fair;</p> <p>e. Penguatan budaya disiplin, integritas, budaya kerja dan budaya melayani bagi Karyawan RSUD Ajibarang;</p> <p>f. Penyempurnaan dan pemutakhiran data pegawai.</p>
g.	Peraturan Perundang-undangan	<p>a. Harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk tahun berjalan;</p> <p>b. Penguatan pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan;</p>
h.	Pelayanan Publik	<p>a. Penguatan system pelayanan berbasis TIK</p> <p>b. Modernisasi system dan manajemen pelayanan public</p> <p>c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan public</p> <p>d. Monitorin dan supervises kinerja pelayanan publik</p>

<p>1. Mental Aparatur</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup implementasi RB RSUD Ajibarang. b. Meningkatnya penerapan/internalisasiasas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kerja dan budaya pelayanan RSUD Ajibarang. c. Meningkatnya profesionalisme aparatur d. Meningkatnya citra positif aparatur RSUD Ajibarang sebagai pelayan masyarakat. e. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur RSUD Ajibarang f. Semakin baik dan terintegrasinya penanganan pengaduan yang berindikasi kerugian negara
<p>2. Pengawasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya Pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> b. Semakin sedikitnya temuan benturan kepentingan di semua unit organisasi
<p>3. Akuntabilitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan dan pengukuran kinerja Kemenkes berbasis TIK yang dapat diakses oleh seluruh aparatur. b. Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional. c. Meningkatnya keterlibatan secara aktif unsur pimpinan di Kemenkes dalam penyusunan, penetapan, pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala. d. Terlaksananya pelaporan kinerja Kemenkes secara terbuka.
<p>4. Kelembagaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi RSUD Ajibarang. b. Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme kelembagaan RSUD Ajibarang

	<ul style="list-style-type: none"> c. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit organisasi. d. Terlaksananya kajian organisasi secara berkala untuk mengantisipasi tantangan organisasi ke depan.
<p>5. Tatalaksana</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Percepatan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis <i>e-Government</i> di RSUD Ajibarang. b. terselesaikannya semua proses bisnis birokrasi RSUD Ajibarang yang sederhana, cepat dan harmonis. c. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi organisasi melalui komputerisasi dan TIK yang terintegrasikan.
<p>6. Sumber daya manusia aparatur sipil negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. SIK yang terintegrasi didukung kualitas SDM yang semakin baik. b. Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif c. Meningkatnya penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit d. Meningkatnya penerapan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur Terbentuknya <i>talent pool</i> (kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai e. Terlaksananya pengukuran kesenjangan kompetensi bagi seluruh pegawai secara berkala untuk penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi f. Semakin baiknya sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi. g. Semakin baiknya pelaksanaan <i>reward and punishment</i> secara fair.

	h. Meningkatnya profesionalisme aparatur Kemenkes.
7. Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapatnya daftar peraturan yang telah dan akan direvisi berdasarkan periodisasi tahunan. b. Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik. c. Terlaksananya mekanisme partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
8. Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas proses bisnis, standar pelayanan, SOP, kepuasan masyarakat dan sistem <i>monitoring</i> dan evaluasi pelayanan publik semua unit kerja pelayanan b. Meningkatnya kinerja dan mutu pelayanan pada unit-unit pelayanan RSUD Ajibarang c. Sistem penilaian, evaluasi kinerja dan tindak lanjut yang semakin baik dalam meningkatkan kualitas pelayan publik semua unit organisasi



C. PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

Mengacu pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 dari Kementerian PAN & RB, Program-program Reformasi Birokrasi RSUD Ajibarang 2015- 2019 (sebagai program tingkatan mikro) harus mencakup:

1. Program Manajemen Perubahan.
2. Program Penguatan Sistem Pengawasan.
3. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
4. Program Penguatan Kelembagaan.
5. Program Penguatan Tatalaksana.
6. Program Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN.
7. Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan.
8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Penjelasan dan perincian kegiatan dari masing-masing program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Manajemen Perubahan. Program ini ditujukan untuk mengubah mental model/perilaku aparatur RSUD Ajibarang yang diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif. Pada gilirannya, budaya kerja ini akan menjadi sarana yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta mampu memberikan

pelayanan yang berkualitas. Dalam hal ini RSUD Ajibarang telah memiliki kelompok *Agent of Change (AoC)* yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Ajibarang Nomor 254 TAHUN 2017 TENTANG AGEN PERUBAHAN PADA RSUD AJIBARANG TAHUN 2017 Dan Tim Asesor Reformasi Birokrasi RSUD Ajibarang berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Ajibarang Nomor 252 TAHUN 2017 TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) RSUD Ajibarang.

Agen perubahan (AoC) dibentuk dalam rangka mengubah sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja menjadi lebih baik sesuai tujuan Reformasi Birokrasi. Dalam Permen PAN & RB Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah disebutkan bahwa agen perubahan adalah individu /kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya. Tugas dan tanggung jawab AoC adalah :

- a. Katalis, untuk meyakinkan pegawai yang ada di masing-masing unit organisasi tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik (tujuan yang direncanakan).
- b. Pemberi Solusi, sebagai pemberi alternatif solusi kepada pegawai di masing-masing unit organisasi yang mengalami kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju tujuan akhir.
- c. Mediator, untuk melancarkan proses perubahan terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit organisasi terkait dalam proses perubahan.
- d. Penghubung Sumber Daya, untuk menghubungkan pegawai yang ada di dalam unit organisasi kepada pembuat kebijakan.
- e. Kompilator, untuk mengkompilasi dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan satuan kerjanya masing-masing.

Program Manajemen Perubahan

Kondisi Yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup implementasi RB di lingkungan RSUD Ajibarang. b. Meningkatnya penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kerja dan budaya pelayanan c. Meningkatnya profesionalisme aparatur d. Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat. e. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur
Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi RSUD Ajibarang b. Meningkatkan peran AoC dalam RB c. Meningkatkan gerakan perubahan unit-unit organisasi d. Meningkatkan <i>engagement</i> pegawai terhadap RB e. Meningkatkan persepsi positif pemangku kepentingan terhadap RB f. Menyiapkan Sekretariat representatif RB

2. Program Penguatan Sistem Pengawasan. Program ini ditujukan untuk memelihara, meningkatkan dan memperkuat pencegahan berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, yang mendorong tumbuhnya perilaku koruptif dan/atau perilaku negatif lainnya menjadi kebiasaan. Adapun kondisi yang diharapkan dan kegiatan-kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut.

Kondisi Yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Semakin baik dan terintegrasinya penanganan pengaduan yang berindikasi kerugian negara b. Meningkatnya Pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> c. Semakin kecil temuan benturan kepentingan di semua unit organisasi
Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan implementasi penanganan pengaduan masyarakat di semua unit organisasi b. Meningkatkan implementasi <i>Whistle Blowing System (WBS)</i> di semua unit organisasi

	c. Meningkatkan pencegahan benturan kepentingan di semua unit organisasi
--	--

3. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Program ini ditujukan untuk terciptanya kemampuan RSUD Ajibarang menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan dampak bagi masyarakat. Program ini diharapkan dapat mendorong birokrasi RSUD Ajibarang lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan semua sumber daya yang telah digunakannya. Adapun kondisi yang diharapkan dan kegiatan-kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut.

Kondisi Yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan dan pengukuran kinerja Kemenkes berbasis TIK yang dapat diakses oleh seluruh aparatur b. Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan professional c. Meningkatnya keterlibatan secara aktif unsur pimpinan di RSUD Ajibarang dalam penyusunan, penetapan, pemantauan dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala. d. Terlaksananya pelaporan kinerja RSUD Ajibarang secara terbuka.
Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperluas unit-unit organisasi yang menggunakan e-procurement (termasuk <i>e-catalog</i>) b. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik negara c. Mengintegrasikan manajemen kinerja RSUD Ajibarang secara terbuka

4. Program Penguatan Kelembagaan. Program ini ditujukan untuk terlaksananya kajian-kajian kelembagaan RSUD Ajibarang guna dapat dilakukannya perubahan yang mungkin dilakukan dan/atau disusunnya rekomendasi untuk perubahan pada periode mendatang, dalam rangka mencegah timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan yang dapat menciptakan budaya feodal pada aparatur. Program ini diharapkan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi di RSUD Ajibarang.

Dengan demikian, akan tercipta budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien di RSUD Ajibarang. Adapun kegiatan-kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut

Kondisi Yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi b. Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme kelembagaan c. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit organisasi d. Terlaksananya kajian organisasi secara berkala untuk mengantisipasi tantangan organisasi kedepan
Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melembagakan pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi ke dalam organisasi b. Menyesuaikan organisasi RSUD Ajibarang dengan perkembangan/tantangan c. Menynergikan organisasi RSUD Ajibarang dengan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten

5. Program Penguatan Tatalaksana. Program ini ditujukan untuk menciptakan kejelasan tatalaksana/tatakerja atau proses bisnis di RSUD Ajibarang, guna mencegah terciptanya perilaku hirarkhies, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat RSUD Ajibarang. Dengan demikian, program ini juga diharapkan dapat berdampak pada perubahan sistem dan prosedur kerja yang diperlukan untuk efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, serta perubahan mental aparatur. Adapun kondisi yang diharapkan dan kegiatan-kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut.

Kondisi Yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Percepatan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis <i>e-Government</i> b. terselesaikannya semua proses bisnis birokrasi yang sederhana, cepat dan harmonis. c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi melalui komputerisas dan TIK yang terintegasi.
--------------------------------	---

Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Merumuskan tatalaksana (proses-proses bisnis) di RSUD Ajibarang sesuai organisasi baru b. Melaksanakan asesmen TIK menuju sistem TIK terintegrasi, efektif, efisien c. Harmonisasi Standard Operating Procedure (SOP) RSUD Ajibarang

6. Program Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN. Program ini ditujukan untuk mengupayakan terbentuknya SDM aparatur RSUD Ajibarang yang kompeten, melalui penerapan secara baik sistem manajemen SDM yang meliputi perencanaan, pengadaan, penempatan, pengembangan, dan pemberhentian. Dengan demikian program ini diharapkan juga berdampak pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di RSUD Ajibarang. Adapun kondisi yang diharapkan dan kegiatan-kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut.

Kondisi Yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif b. Meningkatnya penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit c. Meningkatnya penerapan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur d. Terbentuknya talent pool (kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai e. Terlaksananya pengukuran kesenjangan kompetensi bagi seluruh pegawai secara berkala untuk penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. f. Semakin baiknya sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi g. Semakin baiknya pelaksanaan reward and punishment secara fair h. Meningkatnya profesionalisme aparatur
--------------------------------	--

Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan kembali kebutuhan pegawai sesuai organisasi baru b. Menempatkan pegawai sesuai bakat/minat dan kompetensi c. Meningkatkan pembinaan disiplin pegawai d. Mengembangkan sistem penilaian kinerja pegawai berbasis TIK e. Mengembangkan sistem karier pegawai f. Meningkatkan sistem pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan (diklat)
-----------------	---

7. Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan. Program ini ditujukan untuk meminimalkan tumpang-tindih, disharmoni, ketidakjelasan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, yang dapat membuka peluang untuk penyimpangan atau perilaku negatif aparat RSUD Ajibarang. Dengan demikian, program ini diharapkan mengubah sistem peraturan perundang-undangan di RSUD Ajibarang kearah yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Adapun kondisi yang diharapkan dan kegiatan-kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut.

Kondisi Yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapatnya daftar peraturan yang telah dan akan direvisi berdasarkan perodesasi tahunan b. Meningkatnya kualitas regulasi Kemenkes yang melindungi dan berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih, dan mendorong iklim kondusif bagi publik. c. Tersedianya dan dapat diterapkannya SOP untuk evaluasi dan pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk tahun berjalan b. Memperkuat pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan

8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Program ini ditujukan untuk diterapkannya sistem manajemen pelayanan publik yang sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yakni yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau, serta dilandasi profesionalisme aparatur, di Kementerian Kesehatan. Adapun kondisi yang diharapkan dan kegiatan-kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut.

<p>Kondisi Yang diharapkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas proses bisnis, standar pelayanan, SOP, kepuasan masyarakat dan system monitoring dan evaluasi pelayanan publik semua unit kerja pelayanan b. Meningkatnya kinerja dan mutu pelayanan publik sampai di unit c. Sistem penilaian, evaluasi kinerja dan tindak lanjut yang semakin baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik semua unit organisasi
<p>Kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyempurnaan Proses Bisnis pelayanan public. b. Melakukan Pemetaan Kualitas Pelayanan Publik di Unit-unit RSUD Ajibarang. c. Penilaian dan evaluasi kinerja pelayanan public. d. Mengupayakan kepuasan publik terhadap pelayanan

MATRIK WAKTU PELAKSANAAN AGENDA RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI

NO	KEGIATAN	TAHAPAN	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNGJAWAB
	Program Manajemen Perubahan	a.		
1.	Sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	b. Pembekalan kepada para AoC dan Tim RB c. Sosialisasi Reformasi Birokrasi d. Melaksanakan aksi awareness terhadap pegawai melalui pemasangan poster tag line RB		
2.	Peningkatan peran AoC dalam RB	Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kapasitas AoC		
3.	Mendorong gerakan perubahan di Lingkungan RSUD Ajibarang	Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana		
4.	Meningkatkan Mengagement pegawai terhadap RB RSUD	a. Menyusun kerangka acuan survei engagement pegawai		

	Ajibarang	<p>terhadap RB</p> <p>b. Melaksanakan survei engagement pegawai thd RB</p> <p>c. Melaporkan hasil survei engagement pegawai terhadap RB di RSUD Ajibarang</p>		
5.	Menyiapkan Sekretariat Representatif RB	<p>a. Melakukan analisis kebutuhan ruang Sekretariat RB</p> <p>b. Mengajukan permintaan pengadaan ruangan untuk Sekretariat RB</p> <p>c. Melakukan penataan ruangan dan kelengkapan sarana serta fasilitas informasi di ruangan Sekretariat RB</p> <p>d. Memfungsikan ruang</p>		

		Sekretariat RB untuk pelaksanaan tindak lanjut agenda RB		
Penguatan Sistem Pengawasan				
1.	Meningkatkan implementasi penanganan pengaduan masyarakat di semua unit	<p>a. Menyelenggarakan pertemuan AoC tentang pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat</p> <p>b. Membentuk tim penanganan pengaduan masyarakat lengkap dengan kontaknya</p> <p>c. Menyosialisasikan tentang tim penanganan pengaduan masyarakat di unit2</p> <p>d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat</p>		

2.	Meningkatkan implementasi Whistle Blowing System (WBS) di semua unit	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pertemuan AoC implementasi WBS b. Memroses penerbitan Peraturan Direktur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS) c. Menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Direktur tentang WBS d. Menyelenggarakan upaya motivasi seluruh pegawai di masing2 unit e. Menampung laporan dari whistle blowers dan memantau tindak lanjutnya oleh unit-unit 		
3.	Meningkatkan pencegahan benturan kepentingan di semua unit organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerbitkan Peraturan Direktur tentang Petunjuk Teknis (Juknis) 		

		<p>Penanganan BK</p> <p>b. Menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Direktur tentang Juknis Penanganan BK di unit2</p> <p>c. Melaksanakan penanganan benturan kepentingan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Meminta setiap pegawai membuat pernyataan terbuka hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan2. Melakukan tindakan2 khusus mencegah benturan kepentingan3. Mengeluarkan pegawai dari rapat penting/ pengambilan keputusan yang berpotensi		
--	--	--	--	--

		<p>memiliki benturan kepentingan</p> <p>d. Melaporkan secara berkala tentang penanganan benturan kepentingan</p>		
Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja				
1.	Memperluas penggunaan e-procurement (termasuk ecatalog)	<p>a. Mendorong digunakannya eprocurement</p> <p>b. Memantau dan mengevaluasi penggunaan eprocurement (termasuk e-catalog)</p> <p>c. Memberikan reward/punishment berkaitan dengan penggunaan eprocurement (termasuk e-catalog)</p> <p>d. Melaporkan perkembangan penggunaan eprocurement</p>		
2.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik	a. Membuat/mengembangkan aplikasi pengelolaan keuangan dan BMN serta		

		<p>SOP-nya dan memasangnya di semua</p> <p>b. Koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan dan BMN secara berkala dan menginformasikannya kepada Biro Keuangan</p> <p>c. Memberikan reward/ punishment terhadap unit penggunaan aplikasi dalam sistem pelaporannya</p> <p>d. Melakukan pemutakhiran terhadap aplikasi pengelolaan keuangan.</p>		
--	--	--	--	--

**BAB III
TARGET PMPRB
RSUD AJIBARANG**

Rencana Target Reformasi Birokrasi di RSUD Ajibarang ditinjau dari 8 (delapan) area perubahan yang harus dicapai oleh Kementerian Kesehatan dalam Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Tahun 2017, sebagaimana tergambar dalam tabel dibawah ini.

No	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal	Penilaian PMPRB
A.	Pengungkit		
1.	Manajemen Perubahan	5	
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5	
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	
4.	Penataan Tatalaksana	5	
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	
6.	Penguatan Akuntabilitas	6	
7.	Penguatan Pengawasan	12	
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	
	Sub Total Komponen Pengungkit	60	
B.	Hasil		
1.	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20	
2.	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10	
3.	Kualitas Pelayanan Publik	10	
	Sub Total Komponen Hasil	40	
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	100	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Reformasi Birokrasi RSUD Ajibarang, yang sudah ditetapkan tersebut, diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Tim Reformasi Birokrasi dan Jajaran Pejabat Struktural beserta karyawan untuk mewujudkan pelaksanaan Good Government dan Good Governance di Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang.

Target yang telah ditetapkan semoga dapat tercapai sesuai harapan, sehingga untuk peningkatan capaian Reformasi Birokrasi pada tahun berikutnya dapat lebih baik lagi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas dalam mewujudkan tatanan Reformasi Birokrasi di RSUD Ajibarang.

